



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,  
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Hari/Tanggal	: Selasa, 16 Februari 2016
Masa Persidangan	: III
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	: 20
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Waktu	: Pukul 14.00 WIB–selesai
Acara	: 1. Penjelasan BKKBN tentang kelanjutan Program Pendataan Keluarga Tahun 2015; 2. Penjelasan tentang kelanjutan rencana perekrutan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB); 3. Realisasi penyerapan anggaran BKKBN pada APBN Tahun 2015;
Ketua Rapat	: Dra. Hj. Ermalena MHS/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 30 orang dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI; B. Kepala BKKBN beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.25 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BKKBN RI untuk segera menyelesaikan program pendataan keluarga serta melakukan koordinasi data dengan Kementerian/Lembaga lainnya agar dapat dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lainnya.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BKKBN RI untuk segera menyusun perencanaan perekrutan tenaga PKB/PLKB dengan memperhatikan pemerataan tenaga berdasarkan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kepala BKKBN RI untuk membuat inovasi program kependudukan dan keluarga berencana termasuk penggunaan alat kontrasepsi dalam mengatasi ledakan penduduk.
4. Komisi IX DPR RI meminta Kepala BKKBN RI untuk memanfaatkan jendela peluang (*window of opportunity*) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kepala BKKBN RI untuk membuat program dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi permasalahan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
6. Komisi IX DPR RI menyayangkan rendahnya serapan anggaran BKKBN Tahun Anggaran 2015. Untuk itu Komisi IX DPR RI meminta Kepala BKKBN RI untuk meningkatkan kinerja dalam rangka penyerapan anggaran APBN Tahun Anggaran 2016.
7. Komisi IX DPR RI meminta Kepala BKKBN RI untuk memberikan:
  - a. Rincian realisasi jenis belanja dan kegiatan/program dalam APBN Tahun Anggaran 2015 per unit kerja;
  - b. Rincian jenis belanja dan kegiatan/program dalam APBN Tahun Anggaran 2016 per unit kerja;
  - c. Jawaban secara tertulis atas pertanyaan anggota pada Rapat Dengar Pendapat hari ini.  
selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016.

Rapat diakhiri pukul 16.55 WIB

KEPALA BKKBN,



**SURYA CHANDRA SURAPATY**

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



**Dra. Hj. ERMALENA MHS**  
A-536